



**RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI-TABANAN
TLP.(0361) 811171
2024**

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

Dokumen ini membuat disusun untuk melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan periode 2025 yang sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Dokumen perencanaan ini sangat penting untuk keberadaanya dalam sistem akuntabilitas kinerja isntansi pemerintah dan reformasi birokrasi yang menuntuk kinerja ber-AKHLAK.

Kami sadar bahwa dokumen perencanaan ini belumlah sempurna, untuk itu saran yang membangun dari semua pihak baik formal maupun informal sangat kami perlukan agar dokumen perencanaan ini semakin sinergis dengan RPJPN, RPJPD, RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya untuk mewujudkan Tabanan Aman Unggul Madani.



Tabanan, 16 Desember 2024

Kepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Tabanan,

Nyoman Srinadha Giri, S.E.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
SK PEMBENTUKAN TIM	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujua	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Reviu terhadap RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	24
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 27
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten.....	27
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	28
3.3 Program dan Kegiatan.....	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	37
4.1 Perencanaan Pendanaan	37
4.2 Indikator Kinerja	37
BAB V PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran.....	45

LAMPIRAN

REVISI TABEL 6.1 RESNTRA BPBD TAHUN 2021-2026

DAFTAR TABEL

II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Prangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kab Tabanan ...	7
	2.1 Capaian pengukruan SPM 2021-2023	11
	2.2 Capaian pengukruan IKD 2021-2023	12
	2.3 Capaian pengukruan IKU 2021-2023	12
	2.4 Capaian pengukruan IKP 2021-2023	13
II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.....	14
	2.5 Kejadian Bencana	14
	2.6 Sebaran rekontruksid an rehabilitasi	15
	2.7 Data ASN pada BPBD	16
II.4	Review Terhadap RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tabanan	19
II.5	Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025	25
	3.1 Visi, Misi RPJMD SB dan Tujuan PD	28
III.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tabanan.....	32
	4.1 Kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana	37
	4.2 Indikator Kinerja pada RPJMD SB	38
	4.3 Indikator Kinerja Tujuan	38
	4.4 Indikator Kinerja Utama	39
IV.1	Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan PD Tahun 2025 Kab.Tabanan.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perencanaan memegang peranan yang sangat vital dalam pembangunan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembangunan di era globalisasi menuntut perencanaan kolaboratif yang efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk adanya sinergisitas prioritas pembangunan pusat dan daerah. Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Indonesia Tangguh Bencana (*Resilient*) untuk Pembangunan Berkelanjutan 2045. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2). Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana

Perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan telah disusun sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana dimulai dari desa

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan rasa aman masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Pelimpahan Kewenangan merupakan prasyarat mutlak untuk tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien. Keberanian Pemerintah Kabupaten/kota untuk melimpahkan sebagian kewenangan kepada OPD merupakan tantangan yang cukup berat seiring dengan tarik ulur berbagai kepentingan yang ada di dalamnya. Menjawab tantangan ini adalah tugas besar yang harus dilaksanakan, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah betul-betul merupakan wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah memuat usulan Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan serta kerangka Pendanaan Daerah, Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, Agenda PD dan rencana resmi Daerah (RPJMD, RKPD, dan Renstra PD) dengan Rancangan Renja K / L dan Rancangan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan. Telaah pokok-pokok pikiran dewan juga menjadi bahan kajian perencanaan tahunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana

pembangunan, *Top Down* dan *Botom-Up* diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Rencana Kerja (RENJA) PD BPBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tabanan, Renstra PD, hasil kajian dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
- g. Peraturan daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- h. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46) ;
- i. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1208/01/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai acuan dalam melakukan evaluasi hasil kinerja perangkat Daerah.

b. Tujuan

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 129 menyatakan “Hasil perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup

Adapun isi ringkas atas Rancangan rencana kerja perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan : Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rancangan rencana kerja BPBD.

Bab II. Hasil Evaluasi : Pada bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan urusan
Evaluasi Renja penelitian dan pengembangan tahun lalu dan capaian
Perangkat Daerah tahun lalu, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting
Tahun Lalu penyelenggaraan tugas dan fungsi, revidi terhadap
rancangan RKPD, dan penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat.

Bab III. Tujuan dan : Pada bagian ini memuat telaah terhadap kebijakan
Sasaran Perangkat nasional, tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan.
Daerah

Bab IV. Rencana : Pada bagian ini memuat rencana kerja, indikator kinerja,
Kerja dan Pendanaan : dan pendanaan, serta sasaran kegiatan.
Perangkat Daerah

Bab V. Penutup : Pada bagian ini memuat catatan penting yang perlu
mendapat perhatian untuk perencanaan kinerja lebih baik.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dilaksanakan, diukur, dan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis capaian atas rencana kerja tahun 2023-2024 sebagai berikut :

- a. Realisasi fisik program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Tabanan tahun 2023 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan yaitu :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sudah terealisasi secara fisik 100% dan keuangan sebesar 93,12%
- Program penanggulangan bencana sudah terealisasi secara fisik 100% dan keuangan sebesar 77,91%
- Kedua program sudah terpenuhi target kinerja output atau 100% dan terdapat efisiensi atau penghematan di masing-masing program.

- b. Realisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana yang melebihi target output adalah pada pelayanan kebencanaan yang dimanahkan dalam yaitu pelayanan sosialisasi mitigasi bencana yang awalnya di aparat desa dan siswa SMP, sekarang sudah tersosialisasikan ke dunia usaha (perbankan, klinik, yayasan) dan sekolah dasar sehingga kapasitas masyarakat umum dan anak sekolah semakin kuat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- c. Faktor-faktor penyebab tercapainya target output program dan kegiatan adalah kolaborasi Tim BPBD dengan instansi terkait dalam komitmen meningkatkan ketahanan daerah dan menurunkan indeks risiko bencana karena 133 desa teridentifikasi rawan bencana. Sedangkan factor penghambat yang masih dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang bersertifikat kebencanaan dalam kaji cepat dan analisis dampak kerugian bencana sebagai dasar perencanaan kebencanaan.
- d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil evaluasi pelaksanaan kinerja program dan kegiatan tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan yang tersaji dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel : II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tabanan

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

[illegible]

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
				Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	5	02		Program Penanggulangan Bencana	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kecamatan	10 kecamatan	10 kecama - tan	10 kecama - tan	10 kecama - tan	10 kecama - tan	10 kecama - tan	100%
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Becana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan seecara berkala telah mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan yang dimanahkan yaitu :

- a. Penerapan dan Pencapaian SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di sub urusan bencana. Jenis pelayanan dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam peraturan tersebut adalah : 1). Pelayanan informasi rawan bencana, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 3). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pengukuran kinerja SPM dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri : spm.bangda.kemendagri.go.id dan nilainya dikeluarkan oleh Ditjen Pembangunan Daerah. Tahun 2021-2023 capaian kinerjanya seperti tabel berikut ini.

SPM	Indikator	Reaalisasi / tahun		
		2021	2022	2023
Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	99,15%	85,65%	91,60%

Sumber : Laporan Tahunan, 2023

Kinerja SPM sub urusan bencana ini merupakan kerja keras dan komitmen semua pihak dalam meningkatkan layanan kebencanaan sehingga semua permohonan / usulan masyarakat yang terdampak bencana dapat ditangani dengan baik. Adapun analisis layanannya disajikan seperti berikut ini.

Tabel 2.2 Analisis Kinerja SPM Sub Urusan Bencana

No	Uraian SPM	Target	Realisasi	Analisis
1	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	Empat indikator sudah dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan baik
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	Dua indikator sudah dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	100%	100%	Lima indikator sudah dilaksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik
	Rata-rata		100%	Tuntas paripurna

Adapun perbandingan kinerjanya apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti berikut ini.

Tabel 2.3 Perbandingan Nilai SPM Bencana Kabupaten/Kota di Bali

No	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Nilai SPM (%)	
		2022	2023
1	Kab. Badung	96,07	99,66
2	Kab. Bangli	46,57	100,00
3	Kab. Buleleng	31,11	100,00
4	Kab. Gianyar	97,32	100,00
5	Kab. Jembrana	0,00	100,00
6	Kab. Karangasem	89,62	100,00
7	Kab. Klungkung	93,84	82,00
8	Kab. Tabanan	85,65	100,00
9	Kota Denpasar	99,65	100,00

Sumber : BPBD Provinsi Bali, 2023

b. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Komitmen pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah melalui indikator kinerja daerah, telah ditindaklanjuti oleh Tim Data Kinerja BPBD. Hasil analisis kinerja IKD disajikan seperti berikut ini.

Tabel 2.4 Analisis Kinerja IKD

Urusan	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	Respon time 24 jam 7 hari kerja di tahun 2023 semua permohonan masyarakat terdampak bencana dapat ditangani dengan baik

Tercapaiannya 100% aspek pelayanan umum diurusan wajib dasar dalam waktu tanggap layanan kebencanaan dibuktikan dengan nihil (nol) pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR dan 421 laporan kejadian bencana dapat tertangani sesuai respon time 24 jam 7 hari kerja. Adapun data dukungnya disajikan berikut ini.

Tabel 2.5 Pelayanan penanganan bencana

No	Kejadian bencana	Tahun 2021 Per kejadian	Tahun 2022 Per kejadian	Tahun 2023 Per kejadian
1	Pohon tumbang	114	155	108
2	Tanah longsor	155	219	198
3	Kebakaran	30	39	26
4	Gempa bumi	0	0	3
5	Banjir	6	62	17
6	Lain-lain	95	71	52
	Jumlah kejadian	400	499	421

Sumber : Laporan Tahunan, 2023

c. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Capaian indikator tujuan yaitu dalam pengurangan risiko bencana sudah mendukung pencapaian indikator kinerja tujuan RPJMD yaitu indeks risiko bencana yang setiap tahun dinilai oleh BNPB. Adapun kinerjanya menunjukkan kemajuan yaitu tahun 2021-2023 indeks risiko bencana di kabupaten Tabanan terus dapat diturunkan karena semakin membaiknya penanggulangan bencana di daerah yang mendorong peningkatan indeks ketahanan daerah. Adapun datanya seperti berikut ini.

Tabel 2.6 Perkembangan penurunan indeks risiko bencana

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi/tahun			Keterangan
			2021	2022	2023	
1	Tabanan tangguh menghadapi bencana mulai dari desa	Indeks risiko bencana	153,27	143,87	136,90	Penilaian BNPB

Sumber : BPBD Provinsi Bali, 2023

c. Capaian Indikator Kinerja Utama

BPBD dalam mencapai 2 (dua) kinerja utama di tahun 2023 sudah mampu 100%. Hasil analisis sebagai berikut :

- Semua usulan atau pengaduan masyarakat akan kebencanaan telah dapat dilayani/ diselesaikan secara administrasi oleh manajemen BPBD dan secara teknis oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD dengan dukungan 35 orang personal yang bertugas dua sip yang terbagi 4 (empat) kelompok sehingga 24 jam personal TRC siaga.
- Akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dinilai oleh Inspektorat melalui dokumen LKjIP sebagai bagian dari dokumen SAKIP sudah memperoleh nilai BB. Hasil pengukuan kinerja seperti tabel berikut ini

Tabel 2.7 Capaian pengukuran IKU 2021-2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja/Tahun		
			2021	2022	2023
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	B	BB	BB

Sumber : Laporan Tahunan, 2023

d. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian indikator kinerja dua program sudah 100% Hasil analisis sebagai berikut :

- persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD sudah terlaksana 100% dalam menunjang kelancaran aministrasi dan kelancaran pelayanan publik.
- prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana yang sudah terealisasi 100% dengan waktu tanggap bencana 24 jam 7 hari kerja. Hasil pengukruan kinerja seperti tabel berikut ini

Tabel 2.4 Capaian pengukuran indikator program 2021-2023

No	Program	Indikator	Capaian/ tahun		
			2021	2022	2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%	100%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100%	100%	100%

Kinerja program penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan dilakukan secara menyeluruh di prabencana, tanggap bencana,d an pasca bencana melalui kegiatan :

- Melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota di 10 kecamatan dilakukan secara tatap muka bagi aparaturn SKPD terkait dan aparat desa secara hybrid.
- Melalui penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan sudah terbentuk dan disahkan oleh Perbekel yaitu Desa Pesisir Tangguh Bencana di Desa Tegal Mengkeb dan Desa Berembeng.
- Melalui rencana penanggulangan bencana kabupaen/ kota telah dihasilkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2028.
- Melalui gladi kesiapsiagaan terhadap bencana telah dilakukan gelar kesiapsiagaan kepada 100 orang (siswa SMP, guru, dan karyawan SMP No 5 Sudimara).

- Melalui respon cepat darurat bencana kabupaten/ kota telah ditangani 421 titik kejadian bencana oleh Tim BPBD berkolaborasi dengan instansi terkait dan tidak ada pengaduan/ keluhan melalui SP4N LAPOR karena melalui *call centre* sudah tertangani dengan baik.
- Melalui penanganan pasca bencana kabupaten/ kota telah dilakukan survey dan kajian pasca bencana bagi masyarakat yang terdampak bencana untuk diusulkan mendapatkan anggaran BTT (Bantuan Tidak Terduga) baik ke APBD Kabupaten maupun ke APBD Provinsi Bali. Adapun masyarakat penerima BTT tersebar di 10 kecamatan dan 43 desa.

[illegible]

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan mencakup 10 (sepuluh) kecamatan. Hasil perumusan isu-isu staretgis yang dihadapi seperti berikut ini.

1. Terkait dengan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, BPBD selalu siaga melayani masyarakat yang mana kantor terbuka 24 jam selama 7 hari, bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kebencanaan bisa melalui lewat telepon BPBD (0361) 811171. Dinamika organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tabanan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 dan tanggal 17 Januari 2023 telah dikukuhkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana dari tipe B ke tipe A dengan perubahan struktur yang disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Data ASN pada BPBD

Uraian	Jumlah ASN		Keterangan setelah tipe A
	2021 (TipeB)	2023 (TipeA)	
Struktural	5 orang	6 orang	Eselon IIb, IIIb, IVa
Fungsional Teknis	0 orang	0 orang	Belum ada
Fungsional Umum	15 orang	14 orang	Pelaksana di sekretariat dan bidang
Tim Reaksi Cepat (TRC)	35 orang	35 orang	Staf lapangan non ASN
Tenaga Kontrak	12 orang	12 orang	Staf administrasi non ASN

Sumber : DUK, 2024

2. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yang tertuang dalam RPJMD SB dan Renstra PD yang masih dirumuskan untuk dipecahkan tahun 2025 antara lain:

No	Isu-Isu di RPJMD SB (Bab IV)	Isu-Isu di Renstra PD (Bab III)	Isu-Isu di Ranwal PD (Bab II)
1	Aspek geografi : - wilayah Tabanan sebagai daerah rawan bencana (potensi bencana longsor, tsunami, gempa, dan puting beliung) - pencegahan, penanganan bencana, dan pasca bencana untuk kesiapsiagaan dan meminimalisir kerugian akibat bencana	Pengurangan resiko bencana menjadi prioritas untuk meningkatkan ketahan daerah rawan bencana	- Pengurangan risiko bencana menjadi prioritas dalam meningkatkan ketahanan daerah rawan bencana - Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana didorong untuk menjadikan desa tangguh bencana
2	Aspek perumahan rakyat :	Sinergitas dan kolaborasi	Tingginya kerugian

	identifikasi rumah terdampak bencana dan terkena dampak program pemerintah	pemangku kepentingan penanggulangan bencana masih belum optimal	pemukiman masyarakat dan fasilitas umum akibat dampak bencana
3	Aspek trantibun : - pelayanan dasar SPM masih ketendala SDM dan sapras penunjang - belum semua desa rawan bencana mendapat sosialisasi kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat	Peningkatan kapasitas kebencanaan belum di 133 desa rawan bencana	Pelayanan wajib dasar yang diamanahkan SPM sub urusan bencana belum tuntas paripurna
4	Aspek komunikasi dan informasi : kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola teknologi informasi	- Masih kurangnya atau terlambatnya informasi terkait dengan kebencanaan - Sumber daya manusia aparatur penanggulangan bencana belum semuanya memiliki kompetensi teknis	- Kurangnya sarana kerja berbasis teknologi informasi mendukung update pelayanan kebencanaan - Belum adanya Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan dan kurangnya SDM yang berkompetensi teknis

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelayanan menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi anatra lain :
 - Terbatasnya jumlah PNS di BPBD sehingga pendistribusian tugas-tugas/ pekerjaan banyak yang rankap tugas sehingga menghambat penyelenggaraan tugas, fungsi, dan layanan kebencanaan.
 - Terbatasnya sarana dan prasarana seperti belum memiliki kantor dan gudang yang layak, area parkir baik, yang mana keberadaan saat ini masih menggunakan area badan jalan raya sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi serta pelayanan reaksi cepat belum maksimal.
 - Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan kegiatan di BPBD, hal ini disebabkan karena terbatasnya APBD Kabupaten Tabanan.
4. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terhadap capaian program bahwa pelaksanaan seluruh program yang telah dilaksanakan sangat berdampak positif atas pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak bencana, sehingga masyarakat bisa lebih baik dan hidup layak dalam melaksanakan kehidupannya.

5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
Tantangan besar yang teridentifikasi dalam pelayanan kebencanaan adalah luasnya daerah rawan bencana yang tersebar di 133 desa dengan (sembilan) jenis ancaman bencana sehingga memerlukan manajemen tata kelola pemerintahan yang mendukung kebijakan mitigasi bencana agar masyarakat di daerah rawan bencana menjadi masyarakat siaga dan tangguh bencana.
6. Tindak lanjut atas rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - a. Urusan Perencanaan Pembangunan
Dalam usulan perencanaan pembangunan pada Tahun 2025 untuk melanjutkan rekomendasi DPRD Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2024 atas kebijakan pemerintah daerah pada program prioritas 3. jaminan sosial dan ketenagakerjaan : RTL melalui Sosialisasi mitigasi bencana melalui KIE (komunikasi, edukasi, dan informasi) di daerah rawan kepada siswa SD, SMP, SMK, karyawan swasta, dan masyarakat umum. Selain itu akan dilaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan instansi terkait dan kelompok masyarakat pemerhati kebencanaan melalui Forum OPD, dan usulan dari masyarakat lewat Musrenbang tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Kabupaten, hasil dari musrenbang tersebut akan disampaikan oleh Bappeda kepada OPD terkait apa saja yang menjadi permasalahan di masyarakat.
 - b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Pada tahun anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penanggulangan Bencana. Untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung, disamping itu pula perlu dibangunnya Kantor BPBD yang layak agar dapat memberikan pelayanan yang prima, karena kantor saat ini kurang layak untuk operasional BPBD.

2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 bertipe A telah melakukan penyempurnaan rencana kerja agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun perencanaan kinerja jangka pendek (Renja) sudah disinergiskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah (Renstra) sehingga amanah Peraturan Daerah Kabupaten

Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Semesta Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas BPBD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mensinkronkan rancangan awal Renja dengan ranwal RKPD sehingga penjabaran RPJMD Semesta Berencana sebagai berikut :

- Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul. Madani (AUM)
- Misi : 1. Menwujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)
- Tujuan : 1. Masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan
 - Indikator : Persentase capaian SDGs terhadap target rencana aksi daerah (RAD). Target tahun 2025 adalah 70%.
- Sasaran : 1. Terwujudnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga
 - Indikator : Rata-rata persentase capaian SPM 6 pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, keetrtiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Target tahun 2025 adalah 100%.

a. Proses Usulan Program dan Kegiatan Prioritas

Proses perencanaan dilakuakn sesuai kaidah perundang-undangan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam menjabarkan Renstra ke dalam rencana kerja induk Tahun 2025 yang sudah diproses melalui Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renca dengan dilakukan analisis program dan kegiatan prioritas yang diperoleh dari hasil musrenbang, usulan masyarakat langsung ke BPBD, arahan dewan dan rekomendasi dewan yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2024 atas kebijakan pemerintah daerah pada program prioritas 3. Yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan untuk menggencarkan sosialisasi mitigasi bencana melalui KIE di daerah rawan bencana.

b. Kesesuaian Usulan dengan Isu Straetgis

Tim Penyusun Rencana Kerja PD telah melakukan diskusi dan perumusan dalam penyelarasan usulan program prioritas dalam menjawab isu startegis yang dihadapi di tahun ini.

Tabel II.4
Review Terhadap RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tabanan

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
A	Program Penanggulanga n Bencana	Kabupaten Tabanan	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	559.212.400.000					559.212.400.000	
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Kab. Tabanan	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kec	20.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Kab Tabanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	60 Orang	20.000.000	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Becana	Kab. Tabanan	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	170.000.000	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Kab. Tabanan	Jumlah warganegara dan aparaturn yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang	25.000.000	
						Penguatan kapasitas	Kabupaten Tabanan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan	2 kawasan	20.000.000	

						kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan		kapasitasnya dalam pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			
						Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	1 dok	100.000.000	
						Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kabupaten Tabanan	Jumlah Aparatur dan Warga negara yang mengikuti Gladi kesiapsiagaan	100 orang	20.000.000	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tabanan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	349.212.400	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabanan	Persentase respon penanganan darurat bencana	100%	349.212.400	
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan n Bencana	Kab. Tabanan	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	20.000.000	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/ kota	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	1 dokumen	20.000.000	
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	100%	5.749.198.800					5.749.198.800	

	Kabupaten		dan fungsi BPBD								
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dok	5.449.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	2 dok	2.999.000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dok	2.500.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya Administrasi keuangan BPBD	100%	4.171.657.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Org/bln	4.169.158.000	
						Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD	2 Lap	2.499.400	

3	Administrasi Umum Perangkat daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persenyntase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	63.969.700	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	1 Paket	2.499.400	
						Penyediaan Peralatan Rumah tangga	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yg disediakan	1 Paket	1.997.500	
						Penyediaan bahan logistic kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	8 paket	27.000.000	
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	4.500.000	
						Penyediaan bahan/material	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah paket barang/Material yg disediakan	3 paket	10.000.000	
						Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPBD Kab. Tabanan	Jml Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	12.974.000	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	4.998.800	
4	Pengadaan BMD	BPBD Kab.	Jml Pengadaan BMD pada BPBD	3 unit	258.323.800	Pengadaan peralatan dan	BPBD Kab.	Jml unit peralatan dan mesin lainnya	3 unit	258.323.800	

	Penunjang urusan PD	Tabanan				mesin lainnya	Tabanan	yg disediakan			
5	Penyediaan jasa peninjang urusan Pemerintah daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	1.156.394.600	Penyediaan jasa Surat menyurat	BPBD Kab. Tabanan	Jml laporan penyediaan jasa Surat menyurat	150 lbr	2.000.000	
						Penyediaan jasa Komunikasi,Su mber daya Air dan Listrik	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	12 lap	31.997.000	
						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 lap	1.122.397.600	
6	Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya BMD yg menunjang urusan kantor	100%	93.354.300	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinzn	10 unit	76.757.000	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	27 unit	16.597.300	
	JUMLAH									6.308.411.200	

Sumber : RKPD, 2024

Proses yang dilakukan dalam penyusunan program/ kegiatan prioritas melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, pokok-pokok pikiran dewan telah dirumuskan menjadi kajian partisipatif, teknokratik, dan politis. Usulan masyarakat yang bersifat reguler tidak ada yang melalui e-musren tetapi ada yang langsung menyampaikan ke BPBD. Untuk usulan kebencanaan yang sifatnya tidak terduga dari masing-masing kecamatan dilakukan penelaahan lebih mendalam dan selanjutnya melakukan Forum Organisasi Perangkat Daerah sehingga dapat dihasilkan rumusan kajian teknokratik.

Hasil rumusan tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai bidang prioritas pembangunan. Mengenai kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta prioritas pembangunan daerah meliputi :

1. Pengurangan resiko bencana menjadi prioritas khususnya pada daerah rawan bencana yang telah terpetakan dalam peta rawan risiko bencan di 10 kecamatan.
2. Pemenuhan SPM atas dukungan peralatan peringatan dini yang belum tersebar di daerah rawan bencana, begitu juga dukungan peralatan kedaruratan perlu disediakan dalam respon time pelayanan.
3. Pemenuhan SPM akan petugas terlatih perlu dukungan sumber daya dan pelatihan teknis kebencanaan.
4. Sinergitas pemangku kepentingan penanggulangan bencana (dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum) masih perlu di tingkatkan.
5. Peningkatan kapasitas kebencanaan di tingkat desa belum merata di 133 desa dimana sampai tahun 2024 baru 11 desa saja terbentuk desa tangguh bencana atau 8,27% untuk tumbuh kembang kemandirian dalam penanggulangan bencana tahap awal.

Sinergisitas prioritas yang sudah disinkronisasikan sebagai berikut :

- a) Program penunjang urusan pemerinatahan daerah kabupaten / kota sudah sinergis dengan priorotas daerah : tata kelola pemerintahan dan reforasi birokrasi dan sinergis dengan priritas nasional : memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan public.
- b) Program penanggulangan bencana sudah sinergis dengan priorotas daerah : tenaga kerja dan kesejahteraan sosial dan sinergis dengan priritas nasional : membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Tabel II.5
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kabupaten Tabanan

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPBD Kab. Tabanan	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dok	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	19 Orang/bulan	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
3	Penyediaan bahan logistic kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	
5	Penyediaan Bahan/material	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	
6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Bali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	
1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	
F	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100 %	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPBD Kab Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	BPBD Kab Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang disediakan	12 Laporan	

G	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	BPBD Kab Tabanan	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPBD Kab Tabanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 Unit	
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Tabanan	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Kab. Tabanan	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kecamatan	
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	10 kecamatan	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	60 Orang	
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Becana	Kab. Tabanan	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	
1	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kab. Tabanan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1 Desa	
2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Kab. Tabanan	Jumlah warganegara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang	
3	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Tabanan	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 Orang	
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tabanan	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDP yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan dokumen kaji cepat	100 %	
D	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Tabanan	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	
1	Penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	1 dokumen	

Sumber : Renstra, 2021-2026

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah

a. Telaah terhadap kebijakan pemerintah pusat

Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 mengamanahkan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab pada penanggulangan bencana. Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 mengamanahkan penanggulangan bencana sebagai urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional di bawah koordiansi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana terus berkoordinasi sehingga program kerja sinergis dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) tahun 2020-2040.

b. Telaah terhadap kebijakan pemerintah provinsi

Kebijakan strategis pemerintah Provinsi Bali terutama pada BPBD Provinsi Bali sudah dilakukan sinkronisasi baik melalui forum perangkat daerah, rapat-rapat koordinasi, rapat-rapat teknis, dan kolaborasi dalam pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana sesuai kewenangan sesuai amanah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Program dan kegiatan prioritas yang sinergis sesuai prioritas daerah yang diukur melalui pemenuhan SPM urusan wajib dasar, karena pemenuhan unsur SPM kabupaten/kota akan menjadi ukuran penilaian provinsi yang dikeluarkan oleh BNPB. BPBD Provinsi secara berkala melakukan binwas kebencanaan dalam sinergisitas program kebencanaan dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

c. Telaah terhadap kebijakan pemerintah kabupaten

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik.

Peranan BPBD yang diamanahkan dalam RPJMD Semesta Berencana sangat besar, yaitu menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi BPBD antara lain :

1. Perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien sesuai moto “Tangkas, Tanggap, Tangguh, Pantang Pulang Sebelum Tuntas”
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai dokumen RPJPD SB, RPJMD SB, Renstra perangkat daerah, dan RKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”,

MISI : misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau Langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan)atas: Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan dan Kesehatan; jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya; dan Pariwisata, maka Misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman dan Nyaman dalam Perikehidupan (Aman)
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi di Berbagai Bidang yang Berkepribadian dalam Kebudayaan (MADANI)

Adapun penjabaran atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disinkronisasikan dengan Renstra perangkat daerah 2021-2026 adapun sinkronisasi RPJMDSB dengan Renstra BPBD seperti berikut ini.

Tabel 3.1 Visi, Misi RPJMD SB dan Tujuan PD

RPJMD SB				Renstra PD
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui PPSB di Kabupaten Tabanan	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	1.1 Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana

menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani	Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	2.2Meningkatnya kwalitas tata kelola pemerintah daerah	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah
	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan	4 Sasaran	-

Sumber : Renstra BPBD, 2021-2026

a. Tujuan :

Tujuan Rencana Kenja Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada Tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Tujuan 1.
- Tujuan 1 adalah terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana.
 - Indikator tujuannya adalah menurunkan indeks resiko bencana yang ditargetkan IRB menurun 144,47
 - Rencana pencapaian dengan memenuhi kriteria IRB yang dikeluarkan oleh BNPB dan penialiinya setahun sekali oleh BNPB.
 - Pelaksana adalah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.
2. Tujuan 2.
- Tujuan 2 adalah terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan OPD.

- Indikator tujuannya adalah hasil evaluasi penilaian mandiri reformasi birokrasi yang ditargetkan 90
- Rencana pencapaian dengan memenuhi kriteria reformasi birokrasi perangkat daerah.
- Pelaksana adalah dikoordinasikan oleh Sekretariat dengan dukungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

b. Sasaran :

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

1. Sasaran 1.

- Sasaran 1 adalah pengurangan risiko bencana.
- Indikator sarasannya adalah prosentase waktu tanggap kebencanaan yang ditargetkan 100%
- Rencana pencapaian dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
- Pelaksana adalah Bidang Kedaruratan dan Logistik yang didukung oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Sekretariat

2. Sasaran 2.

- Sasaran 2 adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD.
- Indikator tujuannya adalah nilai LKjIP yang ditargetkan 81 (A)
- Rencana pencapaian dengan memenuhi kriteria akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- Pelaksana adalah dikoordinasikan oleh Sekretariat dengan dukungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tabanan. Tahun 2025, pada BPBD Kabupaten Tabanan terdapat 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Program Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini direncanakan akan dapat mendukung perencanaan kinerja yang akuntabel dan mendorong kelancaran administrasi keuangan dan pelayanan publik.
2. Program Penanggulangan Bencana. Program ini direncanakan akan mendukung pencapaian kinerja SPM dan indikator kinerja BPBD dalam pelayanan pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana, sehingga semua usulan dan pengaduan masyarakat dapat terlayani dalam mendukung misi pertama RPJMD SB.

Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umm Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
9. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
10. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Hasil kajian teknokratik telah disusun rumusan program dan kegiatan prioritas dengan target kinerja dan kebutuhan dananya yang disajikan seperti berikut ini.

Tabel III.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN TABANAN
PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01	BPBD								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	4.033.245.000			100%	4.297.875.400
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	BPBD Kab. Tabanan	3 Dokumen	6.000.000	APBD		3 Dokumen	9.000.000
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	2 Dokumen	3.500.000	APBD		2 Dokumen	5.500.000
1.05.01.2.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	1 Laporan	2.500.000	APBD		1 Laporan	3.500.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	2.680.868.000	APBD		100%	2.807.588.000
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kab. Tabanan	19 Orang	2.677.368.000	APBD	Estimasi ada	19 Orang	2.801.588.000

							penambaha n PNS		
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD Kab. Tabanan	2 Laporan	3.500.000	APBD		2 Laporan	6.000.000
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	152.500.000	APBD		100%	214.719.600
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	1 Paket	2.500.000	APBD		1 Paket	3.500.000
1.05.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	1 Paket	3.500.000	APBD		1 Paket	3.600.000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	40.000.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BPBD Kab. Tabanan	2 Paket	7.000.000	APBD		2 Paket	13.679.600
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	3 Paket	14.500.000	APBD		3 Paket	15.000.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	BPBD Kab. Tabanan	2 Laporan	70.000.000	APBD		2 Laporan	132.000.000

		Konsultasi SKPD							
1.05.01.2.06.01.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPBD Kab. Tabanan	4 Dokumen	5.000.000	APBD		4 Dokumen	6.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	50.000.000	APBD		100%	50.000.000
1.05.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	8 unit	50.000.000	APBD		8 unit	50.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	BPBD Kab. Tabanan	100%	1.016.577.800	APBD		100%	1.065.944.400
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	BPBD Kab. Tabanan	12 Laporan	3.000.000	APBD		150 lembar	2.000.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik yg disediakan	BPBD Kab Tabanan	3 Laporan	32.000.000	APBD		3 Laporan	32.000.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	BPBD Kab Tabanan	12 Laporan	981.557.800	APBD		12 Laporan	1.031.944.800
1.05.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	BPBD Kab Tabanan	100 %	127.300.000	APBD		100 %	150.623.400
1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau laporan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	BPBD Kab Tabanan	12 unit	76.800.000	APBD		12 unit	80.623.400

1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BPBD Kab. Tabanan	16 unit	50.500.000	APBD		16 unit	70.000.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	Kab. Tabanan	100%	730.000.000	APBD		100%	813.000.000
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Kab. Tabanan	10 Kecamatan	50.000.000	APBD		10 Kecamatan	35.000.000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Soisalisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	Kab. Tabanan	60 Orang	50.000.000	APBD		60 Orang	35.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Becana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Kab. Tabanan	100%	350.000.000	APBD		100%	453.000.000
1.05.03.02.02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warganegara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Tabanan	50 orang	0	APBD		50 orang	100.000.000
1.05.03.2.02.06	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kab. Tabanan	1 Desa	50.000.000	APBD		3 Desa	120.000.000
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	Kab. Tabanan	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	173.000.000

1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparaturn dan warga Negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	Kab. Tabanan	100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	60.000.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tabanan	100%	300.000.000	APBD		100%	255.000.000
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase respon penanganan darurat bencana	Kab. Tabanan	100 %	300.000.000	APBD		100 %	255.000.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	Kab. Tabanan	1 dokumen	30.000.000	APBD		1 dokumen	70.000.000
1.05.03.2.02.07	Penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	Kab. Tabanan	1 dokumen	30.000.000			1 dokumen	70.000.000
	jumlah				4.497.668.000				5.110.875.400

Sumber : BPBD, 2024

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perencanaan Pendanaan

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditentukan akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan serta pendanaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam mengemban misi pertama yaitu Menwujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman) akan dapat diwujudkan dengan kerjasama kolaboratif pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Hasil rumusan dalam merencanakan prorgam dan kegiatan priorritas, maka direncanakan pendanaan di tahun 2026 dirancang bersumber dari APBD Kabupaten dan didukung dari APBN, CSR (BUMN dan swasta), dan APBD Provinsi untuk mendukung pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana.

Sesuai hasil Forum OPD dan desk dalam penyelarasan program dan kegiatan maka pada rencana kerja BPBD tahun 2024 ditambahkan satu kegiatan baru yang ditangani Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi yang menangani pasca bencana. Datanya disajikan seperti tabel berikut ini.

Table 4.1 Kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana

No	Kegiatan 2022-2023	Kegiatan 2024-2026
1	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3	Pelayanan peneylamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan peneylamatan dan evakuasi korban bencana
4	-	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

Sumber : Forum OPD, 2024

4.2 Indikator Kinerja

Sesuai amanah peraturan kinerja, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah merumuskan sinergisitas program, kegiatan, sub kegiatan dengan indikator dan targetnya dapat terukur secara berkala. Dukungan anggaran di masing-masing sub kegiatan sudah diselaraskan dengan hasil musrenbang, Forum OPD, dan kajian teknokratik.

a. Indikator Kinerja SPM dan Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD SB

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telh dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang di harapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Indikator Kinerja Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat kami sampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel Indikator Kinerja pada RPJMD SB

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani									
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang Aman dalam Perikehidupan (Aman)									
Tujuan, Sasaran	Indikator	Awal RPJMD	Target Capaian						Sat
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan 1. Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	Persentase capaian SDG’sterhadap target rencana aksi daerah	N.A	70	80	85	90	90	90	%
Sasaran 1 Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	100	100	100	100	100	100	100	%
Bidang urusan	IKD	Awal Renstra	Target Capaian						Sat
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.6 Trantibun limnas	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	100	100	100	100	100	100	100	%

Sumber : RPJMD SB Tahun 2021-2026

c. Indiaktor Kinerja Tujuan

Penjabaran atas visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana yang menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dirumsukan tujuan jangka menengah untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan organisasi. Adapun indikator tujuan disajikan seperti berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	IKT	Awal Rentra	Target Capaian						Sat
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Tabanan	Menurunkan indeks resiko	159,83	156,63	153,50	150,43	147,42	144,47	141,58	%

tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	bencana								
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan OPD	Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	75	80	85	85	90	90	95	%

d. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Tabanan ada 2 (dua) seperti berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai LKjIP	A	A	A	A	A	A	A

e. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Pagu indikatif yang mendukung dua program prioritas urusan wajib dasar sub urusan bencana disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan daerah.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya dirinci sebagai berikut :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dirinci dalam 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan
- Prorgam penanggulangan bencana dirinci dalam 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Adapun rincian lengkapnya dapat kami tuangkan dalam Tabel IV.1 dibawah ini.

Tabel IV.1
RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN TABANAN

PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
		Tahun 2025	
		Target	Dalam Jumlah (Rp).
SASARAN 1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BPBD	Nilai LKjIP	A	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	3.817.688.000
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	5.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.500.000
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	2.679.868.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.677.368.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	76.000.000
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket Komponen instalasi listrik tersedia	1 paket	2.500.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	3.500.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	35.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang dsediakan	2 Paket	5.000.000
Penyediaan Bahan/material	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 paket	12.000.000
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	13.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Penataan arsip dinamis tersedia	4 Dokumen	5.000.000
Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	20.000.000

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 unit	20.000.000
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	1.034.500.000
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 laporan	32.000.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.000.000.000
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	101.800.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	76.800.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	25.000.000
SASARAN 2 PENURUNAN RISIKO BENCANA	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	680.000.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kecamatan	20.000.000

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60 Orang	20.000.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	330.000.000
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Outcome : Indeks risiko bencana Output : Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang	75.000.000
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 Desa	65.000.000
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dok	150.000.000
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	40.000.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	300.000.000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	2 dokumen	300.000.000
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	30.000.000
Koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten/kota	Outcome : Indeks risiko bencana Output :Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	1 dokumen	30.000.000
JUMLAH			4.497.668.000

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pembangunan tahunan dan penyusunan laporan kinerja.
- b. Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini memuat indikator yang dijadikan tolok ukur evaluasi kinerja yaitu tolok ukur capaian 1 indikator kinerja SPM, 2 indikator kinerja daerah, 2 indikator kinerja tujuan, 2 indikator kinerja utama, 2 indikator kinerja program, dan 10 indikator kinerja kegiatan.
- c. Permasalahan yang menjadi penanggulangan bencana yang belum mendapat anggaran, diprioritaskan pelaksanaannya dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi, ABPN, dan CSR dari pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

Pengendalian dan evaluasi atas perencanaan kinerja akan lebih berhasil guna dengan adanya penjabaran dan rencana aksi berjenjang sehingga semua program dan kegiatan dapat menghasilkan manfaat lebih optimal.

Rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan dan akan ditempuh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPBD di tahun 2025 memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab permasalahan kebencanaan sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam membangun daerah dengan perencanaan :

- a. Mengusulkan dan menyesuaikan peta jabatan BPBD untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan BPBD.
- b. Mengusulkan dukungan pemenuhan parameter pencapaian indikator kinerja daerah yaitu indeks ketahanan daerah (IKD), indeks risiko bencana Indonesia (IRB) dan SPM urusan bencana.
- c. Mengusulkan aparatur untuk mengikuti peningkatan kompetensi untuk meningkatkan indeks pemberdayaan manusia (IPM).



Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV / b)
NIP 19740624 200604 1 010

Lampiran
Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

a. Program

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Penanggulangan bencana	Meningkatnya penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana	Presentase penanganan Prabencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100%
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Meningkatnya pelayanan adiministrasi dan pelayanan publik perangkat daerah	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%

b. Kegiatan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target KInerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Meningkatnya pengetahuan mitigasi bencana masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%
Kegiatan pelayaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Meningkatnya layanan penanganan bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kaji cepat pasca bencana	Prosentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuanan yang akuntabel	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%

Administrasi umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Meningkatnya ketersediaan BMD yang membantu peningkatan kinerja perangkatd aerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan publik perangkat daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya BMD yang layak operasional mendukung pelayanan kebencanaan	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%

c. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkanya kualitas perenanaan kinerja BPBD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	2 dokumen
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Meningkatnya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja BPBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya pelayanan gaji dan tunjangan meunjang kienrja pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	13 Orang/ bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Meningkatnya kualitas laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	2 laporan
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menngkatnya penyediaan komponen instalai listrik untuk penerangan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
Penyediaan peralatan rumah tangga	Meningkatnya ketersediaan peralatan rumah tangga mendukung pelayanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan bahan	Meningkatnya	Jumlah Paket Bahan	1 Paket

logistik kantor	ketersediaan logistik untuk operasional kantor	Logistik Kantor yang disediakan	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya keetrsediaan barang cetakan dan foto copy dokumen mendukung layanan administrasi	tersedianya barang cetak dan penggandaan	2 Paket
Penyediaan Bahan/material	Meningkatnya ketersediaan bahan material mendukung operasional kinerja	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Meningkatnya sinkronisasi progam prioritas pusat dan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya tata kelola arsip perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dok
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Meningkatnya sarana kerja operasional mendukung pelayanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 unit
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Meningkatnya ktersediaan materai mendukung layanan adminisrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	150 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya ketersediaan listrik, air, dan telepon menunjang pelayanan publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meningkatnya kkerja aparatur non ASN dalam pelayanan administarsi dan publik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang disediakan	12 Laporan
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Meningkatnya dukungan sarana operasional dalam mobilitas kienrja pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Meningkatnya peralatan kerja yang layak operasional	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 unit
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Meningkatnya warga negara di daerah rawan bencana yang memahami mitigasi bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	50 orang

kabupaten/kota		bencana	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Meningkatnya upaya mitigasi bencana secara tatap muka dan media elektronik / medsos di daerah rawan bencana	Jumlah orang yg mendapatkkan sosialisasi kebencanaan	60 Orang
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Meningkatnya ketangguhan desa di daerah rawan bencana	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	2 Desa
Penyusunan rencana kontijensi	Meningkatnya keersediaan dokumen renkon untuk pedoman mitigasi bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan warga negara mengahdapi bencana	Jumlah warga negara yg mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya respon time layanan tangga pbencana	Persentase erlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	100 %
Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Meningkatnya penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector berdasarkan RP3K kabupaten / kota yag dilegalkan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sector berdasarkan RP3K kabupaten / kota yag dilegalkan	1 Dokumen



Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan.

I Nyoman Srinadha Giri, S.E.,M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740624 200604 1 010



Rencana Kerja

REVISI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 - 2026																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir Tahun 2026			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1. Tervujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam Menghadapi Bencana	1. Pengurangan Risiko Bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	100%	100%	1,463,300,106	100%	1,501,345,909	100%	518,135,063	100%	540,000,000	100%	580,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kec	0	10 Kec	200,000,000	10 Kec	30,000,000	10 Kec	35,000,000	10 Kec	35,000,000	10 Kec	40,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	1 Dok	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01.02	Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tersedianya Balho, Spanduk, twiter, face book, Website dan bendera dalam media informasi bencana	3 Jenis	0	6 jenis	30,000,000	6 jenis	30,000,000	6 jenis	35,000,000	6 jenis	35,000,000	6 jenis	40,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100%	1,113,172,300	100%	1,296,345,909	100%	283,135,063	100%	280,000,000	100%	290,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	1 Dok	170,000,000	0	0	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.02	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda, Kelompok Tani, Yowana Desa yang mendapat pelatihan kebencanaan	50 orang	0	0	0	0	0	0	0	50 orang	100,000,000	50 orang	100,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.06	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	0	2 Desa	2 Desa	70,000,000	2 Desa	70,000,000	2 Desa	80,000,000	3 Desa	120,000,000	3 Desa	120,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.07	Sub. Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	100%	100%	1,043,172,300	100%	1,026,214,780	-	-	-	-	-	-	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.09	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	0	0	1 Dok	173,000,000	0	0	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.10	Sub. Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah gladi ruang luar dan dalam lapang penanggulangan bencana	0	0	0	0	1 kali	30,131,129	1 kali	30,135,063	1 kali	60,000,000	1 kali	70,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	150,127,806	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.02	Sub. Kegiatan Renspon Cepat Darurat Becana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya a tim resp on cepat penanganan darurat bencana	100%	0%	100%	150,127,806	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Persentase tersedianya logistik tenda darurat dan dapur umum dalam penanggulangan bencana	100%	100%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	0 dok	-	-	-	-	-	1 dok	60,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	80,000,000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04.01	Penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	0 dok	-	-	-	-	-	1 dok	60,000,000	1 dok%	70,000,000	1dok	80,000,000	BPBD	Kab. Tbn